



# Midji Ancam Copot Jabatan Kepala SKPD

## Terbukti Bikin Penilaian Keuangan Dari BPK Merosot



Walikota Pontianak Sutarmidji serahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) utk APBD 2014 kpd seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Pemkot Pontianak. Anron

penjabaran APBD Kota Pontianak tahun 2014 kepada seluruh SKPD Pemkot Pontianak, Senin (30/12) di halaman Kantor Walikota.

Diikuti Midji, pencopotan jabatan ini sebagai komitmen dalam meningkatkan tata kelola keuangan dan pemerintahan di lingkungan Pemkot. Tak hanya itu, ia juga meminta Sekretaris Daerah Kota Pontianak Mochamad Akip untuk membuat kontrak kerja bagi para pejabat eselon yang akan dilantik awal tahun 2014 yang isinya antara lain siap mempertanggungjawabkan temuan-temuan hasil pemeriksaan auditor.

"Jangan saudara berpikir eselon dua tetap menduduki eselon dua, tidak mungkin itu. Jangan ikut pola lama, baca aturan," kata Midji.

Ia juga meminta seluruh SKPD untuk segera menyelesaikan semua pertanggungjawaban anggaran. Tata kelola keuangan diharapkan semakin transparan dan mudah diakses masyarakat dengan mempublisk ke website masing-masing SKPD.

"Kita terbuka saja, jangan ada yang disembunyikan supaya kepercayaan masyarakat itu sama pemerintah semakin baik. Yang kita kejar sekarang ini bukan puja-puja, tetapi kepercayaan atau trust masyarakat terhadap pemerintah. Kalau hal itu sudah baik maka kita akan gampang melaksanakan tata kelola pemerintahan," tuturnya.

Untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat, lanjutnya, yang harus dilakukan yakni transparansi dalam segala hal termasuk

tata kelola keuangan dan kemudahan dalam segala aturan.

Pelayanan publik di lingkungan Pemkot pun tak lepas dari sorotan orang nomor satu di Kota Pontianak ini. "Yang kira-kira memberikan pelayanan masih cemberut atau masih suka marah-marah, jangan biarkan petugas itu masih ditempatkan di situ," tukasnya. Besarannya APBD Kota Pontianak tahun 2014 senilai Rp 1,4 triliun lebih. DPA untuk APBD 2014 juga sudah diserahkan ke masing-masing SKPD. Terhitung 1 Januari 2014 seluruh SKPD sudah bisa mulai melaksanakan anggaran maupun tender-tender proyek. "Supaya penyerapan anggaran itu tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran," terang Midji.

Mengenai penyerapan APBD tahun 2013 hampir mencapai 95 persen, dengan belanja modal yang terserap hampir 100 persen. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurutnya sedikit meleset dari target yang dipatok, meski pun ia belum bisa memastikan apakah PAD mencapai target atau tidak. Karena masih ada waktu sehari menjelang tutup tahun. "Yang jelas retribusi ada peningkatan bahkan retribusi kebersihan melampaui target," jelasnya.

Sementara untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLIPA) yang sebelumnya diprediksi mencapai 60 persen, namun hasilnya diperoleh tidak sampai 40 persen. "Ini menunjukkan serapan anggaran kita semakin baik," tutupnya. (ton)

"Saya pastikan, kepala SKPD yang temuannya menyebabkan kita menurun kualitas opininya, harus bertanggung jawab. Bahkan kalau dapat lepaskan jabatannya," tegasnya saat penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Peraturan Walikota (Perwa) Nomor 61 tahun 2013 tentang

pemeriksaan audit di SKPD yang dipimpinnya mengakibatkan penilaian laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merosot. Mengingat, pada selama dua tahun mulai 2012 dan 2013 Pemkot Pontianak merah opininya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**PONTIANAK.** Para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sedianya harus mempersiapkan mental sejak sekarang. Pasalnya, Walikota Pontianak, H Sutarmidji SH, MHum, mengancam akan mencopot jabatan kepala SKPD yang hasil temuan